

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORTNYA MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 642 TAHUN 2002

Oleh

Esha Enanda

Kebijakan Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.642 Tahun 2002 pada dasarnya merupakan perubahan lampiran I nomor urut 108 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 230/MPP/kep/7/1997. Sebelumnya terdapat ketentuan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimport hanyalah barang yang tergolong limbah, namun dengan peraturan baru pakaian bekas import termasuk pada barang yang dilarang tata niaga importnya dalam bentuk apapun. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pakaian bekas import dianggap merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, serta upaya untuk mencegah penularan penyakit berbahaya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan barang yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan barang yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tidak berjalan. Analisis implementasi pada penelitian ini didasarkan pada 6 indikator. Pada indikator pertama, tujuan dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak berjalan. Pada indikator kedua, secara umum memiliki kualitas cukup baik namun kompetensi implementator kebijakan pada dua instansi masih belum sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan sehingga menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator ketiga, implementator kebijakan belum sepenuhnya mampu mencerminkan karakteristik radikal, keras, dan tegas pada sanksi hukum sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan.

Pada indikator keempat, kebijakan dinilai tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang dihadapi Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Dinas perdagangan Kota Bandar Lampung sehingga mempengaruhi sikap/kecenderungan pelaksana kebijakan di lapangan yang mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator kelima, koordinasi yang dibangun tidak efektif dikarenakan tidak adanya komitmen yang kuat sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dinilai belum kondusif sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya